

PENGADILAN NEGERI FAKFAK
LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2026
Untuk Periode yang Berakhir Juni 2026



BAGIAN ANGGARAN 005. 03
BADAN DIRGEN BADAN PERADILAN UMUM

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413
Website. www.pn-fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI FAKFAK
SEMESTER I TAHUN 2026
BAGIAN ANGGARAN 005. 03
BADAN DIRGEN BADAN PERADILAN UMUM

Untuk Periode yang Berakhir Juni 2026

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Fakfak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Peradilan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Papua Barat mengacu pada:

1. PMK 232/PMK.05/2022 – Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
2. PMK 217/PMK.05/2024 – Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. PMK 171/PMK.05/2021 – Pelaksanaan Sistem SAKTI
4. PMK 212/PMK.05/2019 – Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat
5. S-54/PB/PB.6/2025 – Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
6. S-147/PB/2025 - Carrent Issue dan Penyusunan, Penyampaian LKKL Semester I 2025.
7. S-293/KP.3303/2026 tanggal 8 Juli 2026, perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat. Disamping itu. laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Fakfak, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Fakfak

YURICE J.C REMBET, S.T.
NIP. 198707122011012023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1 Dasar Hukum	2
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Fakfak	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	2
A.4 Basis Akuntansi	3
A.5 Dasar Pengukuran	3
A.6 Kebijakan Akuntansi	3
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	10
B.1 Pendapatan	10
B.2 Belanja Pegawai	12
B.3 Belanja Barang	13
B.4 Belanja Modal	14
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	16
B.4.4 Belanja Modal Lainnya	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	17
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	17
C.3 Piutang Bukan Pajak	18

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	18
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	19
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	19
C.7 Persediaan	20
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	20
C.9 Tanah	21
C.10 Peralatan dan Mesin	21
C.11 Gedung dan Bangunan	22
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.13 Aset Tetap Lainnya	23
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan	24
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	24
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	25
C.18 Aset Tak Berwujud	25
C.19 Aset Lain-Lain	26
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga	27
C.22 Pendapatan Diterima di Muka	27
C.23 Uang Muka dari KPPN	27
C.24 Ekuitas	28
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2 Beban Pegawai	28
D.3 Beban Persediaan	29
D.4 Beban Barang dan Jasa	29
D.5 Beban Pemeliharaan	30
D.6 Beban Perjalanan Dinas	31
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	32
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	32
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1 Ekuitas Awal	33
E.2 Defisit LO	33

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi		33
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap		33
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		33
E.5 Koreksi Lain-lain		34
E.6 Transaksi Antar Entitas		34
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)		34
E.6.2 Transfer Keluar		34
E.6.3 Ekuitas Akhir		34
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA		35

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
G. PENJELASAN UMUM	1
A.1 Dasar Hukum	1
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Fakfak	3
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Basis Akuntansi	4
A.5 Dasar Pengukuran	4
A.6 Kebijakan Akuntansi	5
H. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	14
B.3 Belanja Barang	15
B.4 Belanja Modal	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18
B.4.4 Belanja Modal Lainnya	18
I. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	19
C.3 Piutang Bukan Pajak	20
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	20

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21
C.7 Persediaan	22
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	23
C.9 Tanah	23
C.10 Peralatan dan Mesin	24
C.11 Gedung dan Bangunan	25
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	25
C.13 Aset Tetap Lainnya	25
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan	26
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	27
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	28
C.18 Aset Tak Berwujud	28
C.19 Aset Lain-Lain	29
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	29
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.22 Pendapatan Diterima di Muka	30
C.23 Uang Muka dari KPPN	30
C.24 Ekuitas	31
J. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	31
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
D.2 Beban Pegawai	32
D.3 Beban Persediaan	33
D.4 Beban Barang dan Jasa	34
D.5 Beban Pemeliharaan	35
D.6 Beban Perjalanan Dinas	35
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	36
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	37
K. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	38
E.1 Ekuitas Awal	38
E.2 Defisit LO	38
E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi	38

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	38
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39
E.5 Koreksi Lain-lain	39
E.6 Transaksi Antar Entitas	39
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	40
E.6.2 Transfer Keluar	40
E.6.3 Ekuitas Akhir	40
L. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	41



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

Jalan. Yos Sudarso No. 92 Fakfak, Papua Barat 98613. Tlp/Fax (0956) 22413

Website: www.pn-fakfak.go.id ; Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Fakfak Semester I Tahun 2026 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Fakfak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fakfak, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

YURICE J C REMBET, S.T.
NIP. 198707422011012023

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan

1. PMK 232/PMK.05/2024 – Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
2. PMK 217/PMK.05/2024 – Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. PMK 171/PMK.05/2021 – Pelaksanaan Sistem SAKTI
4. PMK 212/PMK.05/2019 – Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat.
5. S-54/PB/PB.6/2024 – Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
6. S-147/PB/2025 - Carrent Issue dan Penyusunan, Penyampaian LKKL Semester I 2025.
7. S-293/KP.3303/2026 tanggal 8 Juli 2026, perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Fakfak Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2026 adalah sebesar Rp18.270.877 atau mencapai (22,46) persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp23.562.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2026 adalah sebesar Rp26.638.000 atau mencapai 39,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp68.254.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp9.532.730 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.532.730; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6.805.752 dan Rp2.726.978.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) - LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp18.270.877, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp31.521.683 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.250.806. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.250.806.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp2.150.156 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp13.250.806 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.827.628 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp2.726.978.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Fakfak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

30 Juni 2026 Dan 2025

Uraian	Cat.	Tahun 2026				Tahun 2025
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Perpajakan	B.2	0	0	0	0,00	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.3	23.562.000	18.270.877	(5.291.123)	77,54	2.844.000
Penerimaan Hibah	B.4	0	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah		23.562.000	18.270.877	(5.291.123)	(22,46)	2.844.000
Belanja	B.5					
Belanja Pegawai	B.6	0	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.7	68.254.000	26.638.000	(41.616.000)	(1,94)	27.166.000
Belanja Modal	B.8	0	0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial	B.9	0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		68.254.000	26.638.000	(41.616.000)	39,03	27.166.000

NERACA

Pengadilan Negeri Fakfak

LAPORAN REALISASI ANGGARA
PER 30 Juni 2026 DAN 2025

NAMA PERKIRAAN	CATATAN		JUMLAH	
			30 Juni 2026	2025
1	2		3	4
ASET				
ASET LANCAR	C			
Kas di Bendahra Pengeluaran	C	1	1.000.000.	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C	2	5.805.752	0
Persediaan	C	3	2.726.978.	2.150.156
JUMLAH ASET LANCAR	C	4	9,532,730.	2,150,156
JUMLAH ASET TETAP	C	5	0.	0
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	C	6	5,805,752.	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C	7	0.	0
Uang Muka dari KPPN	C	8	1,000,000.	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C	9	6,805,752.	0
JUMLAH KEWAJIBAN	C	10	6,805,752.	2,150,156
EKUITAS				
Ekuitas	C	11	2,726,978.	2,150,156
JUMLAH EKUITAS	C	12	2,726,978.	2,150,156
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	C	13	9,532,730	2,150,156

LAPORAN OPERASIONAL

Pengadilan Negeri Fakfak

LAPORAN OPERASIONAL
30 Juni 2026 Dan 2025

Uraian	Cat.	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	18.270.877	2.844.000
Pendapatan Hibah	D.3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	9	18.270.877	2.844.000
BEBAN	9		
Beban Pegawai	D.4	0	0
Beban Persediaan	D.5	7.654.683	8.013.730
Beban Barang dan Jasa	D.6	23.492.000	18.735.000
Beban Pemeliharaan	D.7	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.8	375.000	2.840.000
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.9	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.11	0	0
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		31.521.683	29.588.730
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13.250.806)	(26.744.730)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(13.250.806)	(26.744.730)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(13.250.806)	(26.744.730)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengadilan Negeri Fakfak
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 Juni 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	2.150.156	4.176.178
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13.250.806)	(26.744.730)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			9
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	13.827.628	27.192.277
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		576.822	447.547
EKUITAS AKHIR	E.6	2.726.978	4.623.725

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. *Surat Edaran Mahkamah Agung* Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan. Belanja. dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
- r. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Fakfak dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Fakfak

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025-2029 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Fakfak

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Fakfak Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

Visi Pengadilan Negeri Fakfak mewujudkan :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI FAKFAK YANG AGUNG”

Yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Fakfak menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Fakfak :

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Fakfak sebagai berikut :

1. Menjaga integritas dan kemandirian pengadilan negeri fakfak.
2. Memberikan pelayanan hukum yang inovatif dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia (sdm) pada lingkungan kerja pengadilan negeri fakfak.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada pengadilan negeri fakfak.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Fakfak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Fakfak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Fakfak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Fakfak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang

didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Tanah Rp.7.012.071.000 (Tujuh Miliar Dua Belas Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin Rp. 4.207.076.708 (Empat Miliar Dua Ratus tujuh juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.653.965.000 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap

penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Fakfak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2026	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	23.562.000	23.562.000
Jumlah Pendapatan	23.562.000	23.562.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	73.860.000	68.254.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	73.860.000	68.254.000

Realisasi Pendapatan : Rp. 18.270.877

B. 1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 18,270,877,- dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 23,562,000,-. Atau mencapai 22.46%

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Desember 2026		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	23.562.000	18.270.877	77.54
Jumlah Pendapatan Bruto		23.562.000	18.270.877	77.54
Pengembalian				
Jumlah Pendapatan Netto		23.562.000	18.270.877	(22.46)

B. 1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2026 Rp. 18.270.877,- mengalami Peningkatan sebesar Rp. 15.426.877,- dibandingkan realisasi periode 2025 Rp. 2.844.000,- Hal ini disebabkan karena adanya pengembalian Sisa Panjar tak bertuan.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2026 dan TA 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2026	TA 2025	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.270.0877	2.844.000	15.426.877	542.44
Jumlah Pendapatan Netto		18.270.0877	2.844.000	15.426.877	542.44

B.1 BELANJA

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2026 adalah sebesar Rp. 26.638.000 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp. 68.254.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2026

(dalam rupiah)

KODE	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0.	0.	0.
52	Belanja Barang	68,254,000.	26,638,000.	39.03
53	Belanja Modal	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Bruto		68,254,000.	26,638,000.	39.03
Jumlah Belanja Netto		68,254,000.	26,638,000.	39.03

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Belanja Per 30 Juni Anggaran 68.254.000, Realisasi 26,638,000, Persentase 43.05%

Realisasi belanja periode 30 Juni 2026 Rp. 26,638,000,- mengalami Penurunan sebesar Rp (528,000) dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2025 Rp. 27,166,000,-. Hal ini antara lain disebabkan

oleh adanya Efisiensi Anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak. Rincian Peningkatan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Pegawai mengalami Penurunan sebesar Rp. 0 ,- atau 0% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025. Penurunan ini disebabkan antara lain :

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2026 dan TA 2025

dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2026	Realisasi 2025	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 56,580,000,- dan Rp. 69,662,813,- Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 18.78% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan antara lain: Penurunan belanja barang disebabkan oleh adanya Efisiensi Anggaran dan anggaran belanja barang untuk tahun 2026 mengalami penurunan dibanding 2025.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2026	Realisasi 2025	%
Belanja Barang Operasional	3.017.000	1.395.000	116,27
Belanja Barang Non Operasional	5.475.000	4.690.000	16,74
Belanja Persediaan	2.771.000	5.991.000	(53,75)
Belanja Jasa	15.000.000	12.250.000	22,45
Belanja Perjalanan Dinas	375.000	2.840.000	(86,80)
Jumlah Belanja Kotor	26.638.000	27.166.000	(1,94)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0,00
Jumlah Belanja	26.638.000	27.166.000	(1,94)

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2026	TA 2025	(Rp)	%
Belanja Modal	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0

Pengadilan negeri jakfak untuk 400082 tidak ada Belanja modal untuk tahun 2026 Rp. 0,- tidak mengalami kenaikan/penurunan namun pada Realisasi Belanja Modal untuk untuk Semester I Tahun 2026.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami Penurunan Rp.0,- .

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2026	TA 2025	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00., dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2026	TA 2025	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0

B.5.3. Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2026	TA 2025	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0
Pengembalian				-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	0

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2025.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2026 dan TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2026	TA 2025	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Aset Lancar**

Aset Lancar Rp. 9.532.730,-

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Negeri Fak Fak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.532.730 dan Rp. 2.150.156

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Fakfak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2026	Tahun 2025
1.	Uang Persediaan	1.000.000	0
	Jumlah	1.000.000	0

Penjelasan : Kas Bendahara Pengeluaran pada tanggal 30 Juni 2026 adalah 1.000.000,- sesuai dengan tutup buku anggaran pada tanggal 30 Juni 2026 dengan SPM No.00023A dengan SPP No. 00023T Uraian : Penggantian Uang Persediaan Rupiah Murni untuk keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban UP tanggal 30 Juni 2026. Serta dilampirkan dengan Rekening Koran per 30 Juni 2026.

Kas Lainnya Setara Kas Rp. 5,805,752,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.805.752,00 dan Rp 0,00,

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Kas Lainnya Setara Kas Tahun Anggaran Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2026	31 Desember 2025
1.	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	5.805.752	0
JUMLAH		5.805.752	0

Piutang Bukan Pajak Rp. 0,-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 0.00,- dan Rp 0.00,- terjadi kenaikan sebesar Rp.0.00,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir per tanggal pelaporan.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026

No	Jenis	30 Juni 2026	30 Desember 2025
1	Piutang PNB	-	-
JUMLAH		-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih— Piutang Bukan Pajak Rp.0,00

C. 4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 0.00,- dan sebesar Rp 0,00,- terjadi penurunan sebesar Rp 0.00,- atau 0.00,- %.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing- masing piutang/debitur.

Pada tahun 2025 tidak terdapat Piutang tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp. 0.00,- dan sebesar Rp 0.00,- terjadi penurunan sebesar Rp 0.00,- atau 0.00,- %.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2026.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Negeri Fakfak berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp. 0,00

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan sebesar Rp. 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2026

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

Persediaan Rp 2,726,978,-

C.7 Persediaan

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,726,978,- dan Rp. 2.150.156,- terjadi Kenaikan sebesar Rp. 576,822,- (21,51) %. Hal tersebut dikarenakan Anggaran Untuk Persediaan untuk tahun 2026 juga menurun di banding dengan tahun 2025.

Realisasi sisa persediaan 2026 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2025 dikarenakan meningkatnya jumlah perkara sehingga meningkatnya permintaan barang persediaan dari masing-masing bagian pada pengadilan negeri fakfak.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Juni 2026	Desember 2025
1	Barang Konsumsi	2,726,978	2,150,156
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
Jumlah		2,726,978	2,150,156

Nilai Persediaan diatas berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tanggal 31 Desember 2025 Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp 0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

Persediaan yang belum diregister Rp 0,00

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belum diGUkan	0
2	Belum diGUkan	0
Total		0

Tanah Rp. 0,-

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Fakfak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- tidak terdapat pengurangan dan penambahan Aset Nilai Tanah pada Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Saldo Tanah

(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2026	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00

Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,- dan Rp.0,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,- sehingga ada penambahan pada peralatan dan mesin pada tahun 2025.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2026	0,00
Pembelian	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,- dan Rp 0,-
Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Juni 2026	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah) Saldo per 30 Juni 2026	0
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp. 0 dan Rp. 0 tidak terdapat kenaikan dan Penurunan dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026. Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan aset tetap berdasarkan transfer masuk Monografi.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : *(dalam rupiah)*

Saldo per 30 Juni 2026	0
Pembelian	
Jumlah Mutasi Tambah	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

Tidak adanya Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Fakfak

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 30 Juni 2026	0
Perolehan KDP	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.0,-

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp. 0,00 dan Rp. 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan kenaikan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Irigasi	0	0	0
4	Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Piutang Tagihan TP/TGR Rp 0,00

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp 0,00 dan

Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Negeri Fakfak berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

Uraian	Nilai TGR	Angsuran	Saldo per 31 Desember 2024
-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR Rp 0,00

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	-	-	-	-	-
Total					

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp 0,0 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Negeri Fakfak berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Aset Lain-Lain Rp 0,-

C.19 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp. 0 dan Rp. 0 tidak terjadi kenaikan sebesar Rp 0 atau sebesar 0,00%.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Negeri Fakfak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2026	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan	0

Nilai Buku	0
------------	---

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.0,-

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,- terjadi kenaikan sebesar Rp (0)

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan kenaikan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya	0	0	0
Jumlah		-	-	-

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 0,-

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing- masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp 0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan : Rincian Utang Pihak ketiga ada pada Lampiran

C.22 Utang yang belum ditagihkan

Nilai Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp

0.00,- dan Rp 0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan utang yang belum ditagihkan pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Rincian Utang yang belum ditagihkan

No	Uraian	Jumlah
	Kwitansi Uang Persediaan Belum di SPJ-kan	0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- Dan Rp.0,00

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,726,978,- dan 2,150,156,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 18,270,877,- dan Rp 2,844,000,- Pendapatan tersebut terdiri Dari :

Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
Pendapatan Negara Bukan Pajak				
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,270,877	2,844,000	542,44
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		18,270,877	2,844,000	542,44

Pendapatan Ongkos Perkara	1,410,000.	1,230,000.	12.77
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	16,610,877.	1,274,000.	92.33
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	230,000.	260,000.	(13.04)
Pendapatan Surat di Bawah Tangan	20,000.	80,000.	(300)
Jumlah Pendapatan	18,270,877	2,844,000	84.43

Pendapatan Negara Bukan Pajak pengadilan negeri fakfak, berasal dari Pengesahan Surat diBawah tangan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya, dan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan.

Beban Pegawai Rp. 0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0
4	Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0
7	Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0
8	Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0

9	Beban Uang Makan PNS	0	0	0
10	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	0	0
11	Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
12	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	0	0	0
Total		0	0	0

Beban Persediaan Rp. 7,654,683,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 7,654,683,- dan Rp 8,013,730,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	7.654.683	8.013.730	(4,48)
2	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		7.654.683	8.013.730	(4,48)

Beban Barang dan Jasa Rp. 23,492,000,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 23,492,000,- dan Rp. Rp.18,735,000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.017.000	1.395.000	116,27
2	Beban Bahan	5.475.000	5.090.000	7,56
3	Beban Jasa Konsultan	15.000.000	12.250.000	22,45
Total		23.492.000	18.735.000	25.39

Beban Pemeliharaan Rp. 0,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing- masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Total		0	0	0

Beban Perjalanan Dinas Rp.375,000 ,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 375,000,- dan Rp. 2,840,000,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat

koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000.	2,840,000.	(86,80)
Total		375,000.	2,840,000.	(86,80)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 0,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Beban Penyusutan Irigasi	0	0	0
Jumlah Penyusutan		0	0	0
1	Beban Amortisasi Software	0	0	0
2	Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0
Jumlah Amortisasi		0	0	0
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0	0	0
Total		0	0	0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-	-
Total		-	-	-

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.0,-

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 Rp. 0 dan 2025 Rp. 0 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 2025*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	0	0
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	0
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0

7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	0	0	0
Total		0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 2.150.156,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 2.150.156,- dan Rp.4.176.178,-

Surplus/Defisit-LO Rp 13,250,806

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar Rp 13,250,806. dan Rp 26,744,178.

Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp 0

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,-

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0,-

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-

Koreksi lain-lain Rp 0,00

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dan Rp 0 Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah di Pengadilan Negeri Fakfak per 30 Juni 2026, tidak ada temuan BPK RI Tahun 2025 yang belum selesai di Tahun 2026.

No	Uraian	Jumlah
1	NIHIL	0,00
Total		0,00

Transaksi Antar Entitas Rp. 13,827,628,-

E.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 13,827,628,- dan Rp. 27,192,277,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(18.270.877)
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.638.000
Transfer Masuk	5.460.505
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	13.827.628

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026 DDEL sebesar Rp. 18.270.877 sedangkan DKEL sebesar Rp 26.638.000.

E.7.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 5.460.505 terdiri dari Persediaan Barang Konsumsi.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0 dengan rincian sebagai berikut.

E.7.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan hibah aset tetap atas gedung dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Fakfak atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan Pemerintah Kota Fakfak kepada Pengadilan Negeri Fakfak . Pengesahan Hibah Langsung yang telah menjadi Aset Tetap sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 0,-

E.7.4 Hibah Yang Belum Disahkan / Diregister

Hibah yang Belum Disahkan / Diregister merupakan hibah aset tetap atas gedung dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Fakfak atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan Pemerintah Kota Fakfak kepada Pengadilan Negeri Fakfak yang belum dapat dicatat pada Aplikasi SIMAK-BMN dikarenakan belum diserahkan. Hibah yang belum Disahkan / Diregister sehingga belum menjadi Aset Tetap sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 0,00

Ekuitas Akhir Rp. 2,726,978,-

E.7.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing- masing sebesar Rp. 2,726,978,- dan Rp. 4,623,725,-

E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2026 pada Pengadilan Negeri Fakfak yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2026.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Terdapat temuan pemeriksaan BPK terkait PNPB salinan putusan yang berasal dari E-Court yang tidak disetorkan ke negara tahun 2025. Tindak lanjutnya pada bulan April 2026 telah disetorkan ke negara sejumlah Rp. 432.000 atas transaksi salinan putusan yang berasal dari E-Court. Bukti setoran (Terlampir).

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Fakfak untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022 MA RI berfungsi sebagai koordinator yaitu menerima uang persediaan (UP) yang kemudian langsung didistribusikan seluruhnya sesuai dengan UP.

Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Fakfak MA RI menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening giro. Pada tahun 2014, rekening giro yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Fakfak MA RI sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Unit Kerja	Nomor Rek BRI	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Penampung DIPA BUA	653244000811000	S-985/WPB.12/KP.06/2021
2	Penampung DIPA BADILUM	654444000821000	S-986/WPB.12/KP.06/2021
3	Penampungan Perkara	108101000009306	S-6080/MK.5/2015

Pengadilan Negeri Fakfak melalui Biro Keuangan telah mengajukan permohonan izin pembukaan rekening ke KPPN Fakfak melalui Surat Nomor: W30-U6/411/KU.03/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021, dan mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN Fakfak sesuai Surat Nomor: No.S-2732/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 16 Oktober 2021.

2. Revisi DIPA

Dipa pada Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 ber Nomor : SP-DIPA-

005.03.2.400082/2026 Tanggal 1 Desember 2025. Berjumlah Sebesar Rp. 73,800,000,-
(Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

A. Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman 3 Revisi Ke 01 (Tanggal 11 Februari 2026)

Program dan Kegiatan	Semula (Rp)						Menjadi (Rp)					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA BARANG	2.652	5.652	5.652	5.652	6.012	5.652	0	5.500	5.500	6.000	6.735	6.000
BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Penjelasan : Revisi Pertama tanggal 24 Desember 2025, Tentang revisi Eselon I

B. Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman 3 Revisi Ke 02 (Tanggal 6 Mei 2026)

Program dan Kegiatan	Semula (Rp)						Menjadi (Rp)					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA BARANG	0	5.500	5.500	6.000	6.735	6.000	0	5.000	4.885	5.000	10.615	8.000
BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Penjelasan : Revisi Kedua tanggal 6 Mei 2026 , Tentang Revisi lainnya (Pencantuman / Perubahan Penarikan Dana.

F.4. Tidak Ada Perbaikan Transaksi SPM/SP2D

F.5. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun 2026. Yurice Jeinifer Carolina Rembet,S.T., Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 1/SEK.W31-U3/SK.KU1.1.1/I/2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak Tanggal 2 Januari 2026. Nomor : 2/SEK.W31-U3/SK.KU1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran. Nomor : 3/SEK.W31-U3/SK.KU1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pengelola PNBPN Pengadilan Negeri Fakfak. Nomor: 5/SEK.W31-U3/SK.KU1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Penunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengadilan Negeri Fakfak. Nomor : 4/SEK.W31-U3/SK.KU1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB) Pengadilan Negeri

Fakfak, Nomor : 8/SEK.W31-U3/SK.KU1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	: YURICE JEINIFER CAROLINA REMBET, S.T.
Pejabat Pembuat Komitmen	: YURICE JEINIFER CAROLINA REMBET, S.T.
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: RANDY M. SOHILAIT
Bendahara Pengeluaran	: RIZAL ASBAR , S.H.
Bendahara Penerimaan	: MUHAMMAD RESKY RIDWAN, A.Md., A.B.
Operator SIMAK BMN/ PERSEDIAAN	: DAHLAN SILITONGA, S.T.
Operator SAIBA/GLP	: RIKA MUSTIKA SARI, S.H.

G. DATA CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI DAN PROGRAM APBN

INFORMASI KINERJA KEMENTRIAN /LEMBAGA PERIODE 30 Juni 2026

Kementrian / Lembaga : Mahkamah Agung / Pengadilan Negeri Fakfak

Fungsi : 03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Sub Fungsi : 03.04. PERADILAN

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
503	1049	750.000	375.000	50%	1	1.0000	Kegiatan	50%	Terelisasi Bulan Januari - Bulan Juni 2026
503	1049	26.196.000	31.144.000	35%	60	34.0000	Perkara	54.01%	Terelisasi Bulan Januari - Bulan Juni 2026
503	1049	36.000.000	15.000.000	100%	100	35.0000	Orang	44.67%	Terelisasi Bulan Januari - Bulan Juni 2026
503	1049	360.000	360.000	100.0%	3	3.0000	Perkara	100%	Telah Terelisasi 100 % pada bulan Mei 2026

Pada tahun 2026 Untuk data Capaian Output sampai dengan 30 Juni 2026 pengadilan negeri fakfak Untuk kegiatan AEA001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum telah terealisasi 50%; untuk kegiatan BCAU13 Perkara Pidana uang dieselsaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur telah Terealisasi 54.01%; untuk kegiatan QBA032 Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum telah Terealisasi 44.87%; serta Kegiatan QCA001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara telah terealisasi 100% .

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA**BULAN JUNI TAHUN : 2026**

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1.	Saldo Awal	Rp. 5.461.298,00	
2.	Penerimaan bulan ini	Rp. 3.150.000,00	
3.	Biaya Panggilan		Rp. 87.000,00
4.	Biaya Penerjemahan		Rp. ----
5.	Biaya Sita		Rp. ----
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat		Rp. 500.000,00
7.	Biaya Sumpah / ATK.		Rp. 650.000,00
8.	Biaya Pemberitahuan		Rp. 274.000,00
9.	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. ----
10.	Meterai		Rp. 40.000,00
11.	Hak – hak Kepaniteraan		Rp. 160.000,00
12.	Pengembalian sisa panjar kedua pihak Berperkara		Rp. 483.000,00
	S A L D O		Rp 6.417.298,00
J U M L A H		Rp. 8.611.298,00	Rp. 8.611.298,00

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS KEUANGAN PERKARA

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, telah dilakukan rekonsiliasi dengan kondisi sebagai berikut :

Menurut Buku :

Buku Induk Keuangan Perkara

I	Perdata				
a	Saldo bulan lalu	:	Rp	3,315,798.00	
b	Penerimaan	:	Rp	5,333,000.00	
c	Pengeluaran	:	Rp	<u>3,187,500.00</u>	
	Jumlah I				Rp 5,461,298.00
II	Buku Keuangan Konsinyasi				
a	Saldo bulan lalu	:	Rp	-	
b	Penerimaan	:	Rp	-	
c	Pengeluaran	:	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah II				Rp -
III	Buku Keuangan Eksekusi				
a	Saldo bulan lalu	:	Rp	2,010,500.00	
b	Penerimaan	:	Rp	-	
c	Pengeluaran	:	Rp	<u>160,500.00</u>	
	Jumlah III				Rp 1,850,000.00
IV	Buku Keuangan Pidana				
a	Saldo bulan lalu	:	Rp	-	
b	Penerimaan	:	Rp	-	
c	Pengeluaran	:	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah IV				Rp -
V	Buku Bantu Biaya Proses				
a	Saldo bulan lalu	:	Rp	3,309,000.00	
b	Penerimaan	:	Rp	1,450,000.00	
c	Pengeluaran	:	Rp	<u>2,243,000.00</u>	
	Jumlah V				Rp 2,516,000.00
	Saldo Pembukuan (I+II+III+IV+V)				Rp 9,827,298.00
	Menurut Kas :				
1	Uang Tunai *)	:	Rp	176,748.00	
2	Saldo Bank	:	Rp	9,655,752.00	
3	Materai	:	Rp	<u>-</u>	
	Saldo Kas	:			Rp 9,832,500.00

Selisih (Saldo Pembukuan - Saldo Kas)

-Rp 5,202.00

Penjelasan :

Termasuk di dalam saldo bank tersebut :

- Jasa Giro belum tarik : Rp -
- Uang Pihak ke-3 belum dibuku : Rp -

Rp -

Selisih Kurang *)

Keterangan :

Selisih Rp. 5.202,00 adanya percobaan setoran biaya oleh Bank BRI ke Pengadilan Negeri Fakfak sehubungan dengan pembuatan (penerimaan) EDC yang digunakan sebagai Rekening sarana pelayanan

penyetoran panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Fakfak

Rekapitulasi Biaya Perkara Dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia Dan Badan Peradilan Dibawanya
Pengadilan Negeri Fakfak Bulan Juni Tahun 2026

Uraian	Keadaan Keuangan			
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
Biaya Perkara	5.461.298,00	3.150.000,00	2.194.000,00	6.417.298,00
Biaya Eksekusi	1.850.000,00	NIHIL	NIHIL	1.850.000,00
Konsinyasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Titipan Pidana	NIHIL	5.000.000,00	NIHIL	5.000.000,00
Penerimaan Uang PHI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Lain-lain	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	7.311.298,00	8.150.000,00	2.194.000,00	13.267.298,00

	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0	NIHIL
--	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI FAK FAK 400082

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:48 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	23,562,000	18,270,877	(5,291,123)	78	15,641,000	2,844,000	12,797,000	18
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,562,000	18,270,877	(5,291,123)	78	15,641,000	2,844,000	12,797,000	18
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	23,562,000	18,270,877	(5,291,123)	78	15,641,000	2,844,000	12,797,000	18
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	68,254,000	26,638,000	(41,616,000)	39	61,744,000	27,166,000	34,578,000	44
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	68,254,000	26,638,000	(41,616,000)	39	61,744,000	27,166,000	34,578,000	44
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI FAK FAK 400082

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:48 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	68,254,000	26,638,000	(41,616,000)	39	61,744,000	27,166,000	34,578,000	44
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:47 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	31,521,683	29,588,730	1,932,953	6.533
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13,250,806)	(26,744,730)	13,493,924	(50.455)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,250,806)	(26,744,730)	13,493,924	(50.455)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,250,806)	(26,744,730)	13,493,924	(50.455)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:47 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,270,877	2,844,000	15,426,877	542.436
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,270,877	2,844,000	15,426,877	542.436
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,270,877	2,844,000	15,426,877	542.436
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	7,654,683	8,013,730	(359,047)	(4.48)
Beban Barang dan Jasa	23,492,000	18,735,000	4,757,000	25.391
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	375,000	2,840,000	(2,465,000)	(86.796)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Keterangan :

FINAL

Fakfak, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKRA
KUASA PENGUNA ANGGARAN

YURICE IC REMBET, S.T
NIP. 198707122011012022



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
 Tgl Cetak : 21/07/26 8:48 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,150,156	4,176,178	(2,026,022)	(48.51)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,250,806)	(26,744,730)	13,493,924	(50.45)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,827,628	27,192,277	(13,364,649)	(49.15)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	576,822	447,547	129,275	28.89
EKUITAS AKHIR	2,726,978	4,623,725	(1,896,747)	(41.02)

Keterangan :
 FINAL

Fakfak, 21 Juli 2026
 Peranggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 YURICE J.C. REMBET, S.T
 NIP 198707122011012022



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
 SATUAN KERJA : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM
 Tgl Cetak : 21/07/26 8:48 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0	1,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,805,752	0	5,805,752	0.00
Persediaan	2,726,978	2,150,156	576,822	26.83
JUMLAH ASET LANCAR	9,532,730	2,150,156	7,382,574	343.35
JUMLAH ASET	9,532,730	2,150,156	7,382,574	343.35
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,805,752	0	5,805,752	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,000,000	0	1,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,805,752	0	6,805,752	
JUMLAH KEWAJIBAN	6,805,752	0	6,805,752	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,726,978	2,150,156	576,822	26.83
JUMLAH EKUITAS	2,726,978	2,150,156	576,822	26.83
JUMLAH EKUITAS	2,726,978	2,150,156	576,822	26.83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,532,730	2,150,156	7,382,574	343.35

Keterangan :
 FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	5,805,752	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,726,978	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	5,805,752
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	26,638,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,270,877	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,460,505
0.0	391111	Ekuitas	0	2,150,156
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	20,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	230,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	1,410,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	16,610,877
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,017,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,475,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,654,683	0
JUMLAH			59,325,290	59,325,290

Keterangan :

FINAL

Fakfak, 21 Juli 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGUNA ANGGARAN



YURICE, J.C. REMBET, S.T
 NIP. 198707122011012022

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
 SATUAN KERJA : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	26,638,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	18,270,877	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	20,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	230,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	1,410,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	16,610,877
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,017,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,475,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,771,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375,000	0
JUMLAH			44,908,877	44,908,877

Keterangan :

FINAL

Fakfak, 21 Juli 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGUNA ANGGARAN



KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I (JUNI) TA 2026

Kode dan Nama (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK
 UAKPA :
 Kode dan Nama (00KD) PAPUA BARAT
 UAPPAW:
 Kode dan Nama (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Eselon I :
 Kode dan Nama (005) MAHKAMAH AGUNG
 K/L :

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	V		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2. Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi SAKTI/MonSAKTI termasuk perbandingan dengan tahun 2025?	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama

PENGECHEKAN PADA MonSAKTI				
To Do List		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V	Tidak
2.	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V	Tidak
3.	Terdapat Persediaan belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4.	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5.	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V	Tidak
6.	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7.	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8.	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9.	Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10.	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11.	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12.	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2.	Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3.	Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak

	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
Rekon Internal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Selisih Rekon Internal			Tidak
Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai decimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak

3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak
9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXXX dan 2XXXXXX) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2.	Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal		N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya

1.	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial			Tidak
2.	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			V	Ada/Tidak
1.	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak
3.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			N/A	Ada/Tidak
1.	Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI			
2.	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)			
3.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2.	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di		N/A	Ya/Tidak

	modul Aset Tetap?			
3.	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrua?		N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Saldo Awal 1 Jan 2026 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya			Ya
2.	Saldo pada neraca bernilai wajar			Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening			Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito			Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak

3.	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?			Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar			Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan Pos-Pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		N/A	Ya
	Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2.	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3.	Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4.	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya/Tidak

7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4.	Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5.	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2.	Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2.	Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		N/A	Ya/Tidak

3.	Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4.	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5.	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2.	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3.	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
5.	Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya
6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI"

Mengetahui,
Pejabat Penyusun LKKL,



Rizal Asbar, S.H.

NIP. 198103302014051001

Penelaah,

Rika Mustika Sari, S.H.

NIP. 198603272025212031

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (03)

PENGADILAN NEGERI FAK FAK (400082)

Rekening Induk : 023001004085304 (RKK DITJEN BADILUM O)

Periode : 01-06-2026 s/d 30-06-2026

Kode Eselon I	Kode KPPN	Kode Satker	Nama Satker	Nama Rek. Satker	No. Rek. Satker	Tanggal Transaksi	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo Akhir
03	067	400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	BPG 067 PENGADILAN NEGERI FAKFAK	654444000621000	2026-06-11	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summary							0	0	1.000.000	1.000.000

BRI Virtual Dashboard

Last Update : 01-07-2026 Pukul 09:26:12



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

NO	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon 1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja Data OMSPAN			Keluaran Data SAKTI						GAP	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal rekam disakti	Tanggal kirim disakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Konfirmasi	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	00503	6	BF	1049	AEA001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	375.000	50	2	kegiatan	0	0	0	1	50	50	0	00	Non PN	Belum Terealisasi untuk Bulan Juni 2026	terkonfirmasi	-	03-07-2026 07:08:08	08-07-2026 09:01:51			
2	400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	00503	6	BF	1049	BCAU13	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	31.144.000	10.903.000	35	60	Perkara	7	10	25.42	34	50	54.01	19	00	Non PN	Terealisasi untuk bulan Juni 2026	terkonfirmasi	-	08-07-2026 08:55:13	08-07-2026 09:01:51			
3	400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	00503	8	BF	1049	QBA032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	15.000.000	42	100	Orang	6	8	11.34	35	44	44.67	3	00	PN	Telah Terealisasi untuk Bulan Juni 2026	terkonfirmasi	-	08-07-2026 08:52:44	08-07-2026 09:01:51			
4	400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	00503	6	BF	1049	QCA001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	360.000	360.000	100	2	Perkara	0	0	0	2	100	100	0	00	PN	Telah Terealisasi pada Bulan Mei 2026 Sebesar 100%	terkonfirmasi	-	03-07-2026 07:25:05	08-07-2026 09:01:51			

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2026

Periode s.d bulan : 2026-06
 Kementerian Negara/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
 Eselon 1 : 005.03 - Ditjen Badan Peradilan Umum
 Wilayah/Provinsi : 33.03 - KAB. FAK FAK/PAPUA BARAT
 Satuan Kerja : 400082 - PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 23-07-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	68,254,000.00	26,638,000.00	39.03%							
04	PERADILAN	68,254,000.00	26,638,000.00	39.03%							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	68,254,000.00	26,638,000.00	39.03%							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	68,254,000.00	26,638,000.00	39.03%							
AEA	Koordinasi	750,000.00	375,000.00	50%							
001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750,000.00	375,000.00	50%	2.0000	Kegiatan	1.0000	50%	0%	(00)	Belum Terealisasi untuk Bulan Juni 2026
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	31,144,000.00	10,903,000.00	35.01%							
U13	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	31,144,000.00	10,903,000.00	35.01%	60.0000	Perkara	34.0000	54.01%	19%	(00)	Terealisasi untuk bulan Juni 2026
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36,000,000.00	15,000,000.00	41.67%							
032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	36,000,000.00	15,000,000.00	41.67%	100.0000	Orang	35.0000	44.87%	3%	(00)	Telah Terealisasi untuk Bulan Juni 2026
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	360,000.00	360,000.00	100%							
001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	360,000.00	360,000.00	100%	2.0000	Perkara	2.0000	100%	0%	(00)	Telah Terealisasi pada Bulan Mei 2026 Sebesar 100%

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2026-05

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROPINSI : 3300 KANTOR DAERAH
 SATUAN KERJA : 400082 PENGADILAN NEGERI FAK FAK
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 27-07-2026
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
04-05-2026	001/400082/20 25/Jurnal Balik	Jurnal Balik atas Eliminasi RPL Tahun 2025	400082.067.111825.0050300.0000000. 0000000000.000000.2.3303.2.000000.0 00000	111825	AKRUAL	23,037,752	0	Sudah
04-05-2026	001/400082/20 25/Jurnal Balik	Jurnal Balik atas Eliminasi RPL Tahun 2025	400082.067.212192.0050300.0000000. 0000000000.000000.2.3303.2.000000.0 00000	212192	AKRUAL	0	23,037,752	Sudah
						23,037,752	23,037,752	

MONITORING JURNAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE : 2026-05

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROPINSI : 3300 KANTOR DAERAH
 SATUAN KERJA : 400082 PENGADILAN NEGERI FAK FAK
 JENIS KEWENANGAN : KD MAHKAMAH AGUNG

Tanggal : 15-05-2026
 Halaman : 1

TGL JURNAL	KODE BUKU BESAR	NO. DOK	DESKRIPSI TRANS	KODE COA	KODE AKUN	NAMA AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	TIPE JURNAL
04/05/2026	GLP-400082-511725386	001/400082/2025/Jurnal Balik	Jurnal Balik atas Eliminasi RPL Tahun 2025	400082.067.212192.0050300.00 00000.00000000000.00000.2.330 3.2.000000.000000	212192	Dana Pihak Ketiga	AKRUAL	0.00	23,037,752.00	Balik
04/05/2026	GLP-400082-511725386	001/400082/2025/Jurnal Balik	Jurnal Balik atas Eliminasi RPL Tahun 2025	400082.067.111825.0050300.00 00000.00000000000.00000.2.330 3.2.000000.000000	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	AKRUAL	23,037,752.00	0.00	Balik
								23,037,752.00	23,037,752.00	

berdasarkan S-1690/PB/2015, petugas akuntansi /operator saiba satuan kerja pengadilan negeri fakfak membuat momo penyesuaian sebagai berikut.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon : 03 DIRGEN BADAN PERADILAN UMUM
Wilayah : 3300 PAPUA BARAT
Satuan Kerja : 400082 PENGADILAN NEGERI FAKFAK
No. Dokumen : Kas Lain di Bendahara Penerima
Tanggal : 4 Mei 2026
Tahun Anggaran : 2026
Keterangan : Jurnal Balik Saldo RPL Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☐ Kas Di Bendaharan Penerimaan	☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Kas Di Bendahara Pengeluaran	☐ Koreksi
☐ Persediaan	☒ Kas Lainnya dibendahara Penerima

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Jurnal Balik Atas Eliminasi RPL Tahun 2025	23,037,752	
	K	212192	Jurnal Balik Atas Eliminasi RPL Tahun 2025		23,037,752

Dibuat oleh : kasubbag Keuangan

Rizal Asbar, S.H.

NIP. 198103302014051001

Tanggal : 4 Mei 2026

Dikontrol oleh : KPA

YURICE JEINSEER CAROLINA REMBET, S.T.

NIP. 198707122011012022

Tanggal : 4 Mei 2026

Direkam oleh : Operator GLP

Rika Mustika Sari, S.H.

NIP. 198603272025212031

Tanggal : 4 Mei 2026



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

Jalan. Yos Sudarso No. 92 Fakfak, Papua Barat 98613. Tlp/Fax (0956) 22413

Website: www.pn-fakfak.go.id ; Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Nomor : **752**/SEK.W31-U3/KU2.1/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan UAKPA Semester I Tahun 2026 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak (400082)

Fakfak, 27 Juli 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Fakfak

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2026, Berikut kami sampaikan Laporan UAKPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak (400082) sebagaimana terlampir dalam surat ini. Adapun Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2026 tersebut telah berisi :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Ringkasan Laporan;
2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
3. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran (Cetakan Sakti);
4. Lampiran Laporan Operasional (Cetakan Sakti);
5. Lampiran Laporan Perubahan Ekuitas (Cetakan SAKTI);
6. Lampiran Laporan Neraca (Cetakan SAKTI);
7. Telaah Laporan UAKPA;

Demikian yang dapat kami sampaikan, Atas Perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran



YURICE L CREMBET, S.T.
NIP. 198707122011012022